

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ajif, P. (2013). *Peran pemerintahan Sosial pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Jurnal Penelitian*, 31–40.
- Amirulloh, A. M. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pungutan liar di Obyek Wisata Cipanas Kabupaten Garut*.
- Arleta, G. (2019). *PARleta, G. (2019). Pungli Oleh Satgas Saber Pungli. 20(1), 148–171.ungli Oleh Satgas Saber Pungli. 20(1), 148–171.*
- Arliman S, L. (2020a). *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>
- Arliman S, L. (2020b). *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49–72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>
- Aryani, M. D. S. (2021). *Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul. 2013, 1–23.*
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi. 6-12.*
- Bridgman. (2017). *Analisi Pengembangan Obyek Wisata Candi Muara Takus sebagai Wilayah Budaya di Kabupaten Kampar. 17–38.*
- Bridgman (2017). (2023). *Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pungutan Liar di Pelayanan _Publik Provinsi Bali. Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 1229–1234.*
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2023). *Harmonisasi regulasi hukum dimedan, 4. https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.7997.699-711*
- Citra Larasati, D., & Rohman, A. (2020). *TUMPANG TINDIH PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (Studi tentang Retribusi dan Pajak Parkir di Kota Malang). REFORMASI, 10. https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/index*
- Creswell. (2016). *Strategi Adaptasi Sosial Budaya Mantan Pekerja Seks Komersial Dalam Penerimaan Masyarakat di Lingkungan Sosial RRI Surakarta. 01, 1–23.*

- Gani, R. A., & Suparman, A. (2023). *Penerapan Prinsip Good Governance dalam Kebijakan Publik di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Subang)*. *The World of Public Administration Journal*, 5(1), 35–47. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654>
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, August 2017. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07>
- Haidin Ali Hamzah Litololy1, R. S. (2024). Haidin Ali Hamzah Litololy1, R. S. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor*. *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor*, 4 Nomor 1(April), 49–56. *Penegakan . Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pungutan Liar (Pungli) Dalam Penerbitan Kendaraan Bermotor*, 4 Nomor 1(April), 49–56.
- Huberman, M. (2019). *Peran Pemerintah terhadap Pungli di Bogor, Penelitian Kualitatif*. *Jurnal Ilmiah*, 2(1), 30–34.
- Mahardita, P. A. (2024). *PENGELOLAAN PRAKTIK PARKIR ILEGAL DI KECAMATAN TEMBALANG (STUDI KASUS KAWASAN UNIVERSITAS DIPONEGORO)*. *Journal of Politic and nment Study*, 397–411. <https://anewsid.com/2024/01/01/tuk>
- Nikodimus. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. In *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* (Vol 19, Number 2). <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i2.563>
- Pratiwi, N. T. S. I., & Ni Nengah, A. (2019). *Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia*. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10), 1–15.
- Ratrisari, E. P., Rajagukguk, J. P., & Manalu, E. V. (2025). *Tinjauan Normatif atas Kekosongan Regulasi Teknis dan Lemahnya Budaya Hukum Pejabat Administratif*. *Jurnal Multidisiplin Dehasen*, 4(2), 333–338.
- Safitri, A., Sulaksono, T. P., Aziz, M. A. A., & Dewantara, M. B. (2025). *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Juru Parkir Liar Di Kota Bandar Lampung*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2, 995–1004.
- Salipu, M. R. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Melalui Saber Pungli*. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.13-22>

Sulasno. (2023). *Law Enforcement against Illegal Levies as a Form of Abuse of Authority through Saber Pungli*. 41–47. <https://doi.org/10.32996/ijlps>

Tjokroamidjojo (1990). (2013). *Konsep Good Governance*.

Wibawa, S., Fauzy, A., & Habibah, D. A. (2013). *Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 74–85.

Wulandari, S. (2015). *Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda*. *eJournal Administrasi Negara*, 3(1), 35–46.

Yin, R. K. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. *Suparyanto dan Rosad (2015, 5(3), 248–253*.

Buku:

Agus Mahendra Iswara, S.H., M. H. (2023). *Serba Serbi Pungutan Liar (Pungli) dalam Tinjauan Yuridis* (M. H. Agus Mahendra Iswara, S.H., Ed. Agus Mahen). CV. Adanu Abimata. [https://books.google.co.id/books?id=Q0fTEAAQBAJ&lpg=PA30&dq=serba serbi pungutan liar dalam tinjauwan yuridis&lr&hl=id&pg=PA11#v=onepage&q=serba serbi pungutan liar dalam tinjauwan yuridis&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Q0fTEAAQBAJ&lpg=PA30&dq=serba+serbi+pungutan+liar+dalam+tinjauwan+yuridis&lr&hl=id&pg=PA11#v=onepage&q=serba+serbi+pungutan+liar+dalam+tinjauwan+yuridis&f=false) Nikodimus. (2022). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. In *FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang (Vol 19, Number 1)*. <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i2.563>

Amirulloh, A. M. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pungutan liar di Obyek Wisata Cipanas Kabupaten Garut*. Amirulloh, A. M. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pungutan liar di Obyek Wisata Cipanas Kabupaten Garut*.

Agustina, S. B., kemas, K. A. N., & Mustaqim, M. A. S. (2024). *OPTIMIZATION LOCAL GOVERNMENT REVENUE: REFORMULASI REGULASI UNTUK MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DISHUB DAN BAPENDA DALAM PENGELOLAAN PARKIR DI KOTA MALANG*. *Jurnal Studia Legalia*, 5.

Skripsi:

Primatama, P. T., & Sarana, C. (2024). *PROPOSAL SKRIPSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ATAS PUNGULAN LIAR*.

Amirulloh, A. M. (2015). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pungutan liar di Obyek Wisata Cipanas Kabupaten Garut*.

Undang-Undang dan Perda:

(Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, 2016)

(Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir, 2014)

(Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, 2020)

(Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014).Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pub. L. No. 87 (2016).

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).

(Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik) (Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pasar Bupati Ciamis di pasal 1 ayat 34 menjelaskan tentang pemberdayaan.

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang kegiatan pemerintah yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. (peraturan Presisen (perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Inastasi Pemerintah (SAKIP).

Sumber lain (internet):

Pemberantasan Pungli di Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik, 28 Nov 2019, <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1174-pemberantasan-pungli-di-instansi-pemerintah-dan-pelayanan-publik>